2021

CAPAIAN
KINERJA

BBPP
BINUANG

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan II tahun 2021. Sebagai bahan evaluasi kinerja juga dibandingkan dengan kinerja lima tahun sebelumnya serta kinerja yang diharapkan pada rencana strategis yang telah disusun yaitu tahun 2021 - 2024.

A. Kriteria Ukuran Keberhasilan

Gambaran kinerja BBPP Binuang dapat diketahui dari hasil pengukuran kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target yangtelah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja Triwulan II tahun 2021 tersebut digunakan metode *scoring* yang mengelompokkan capaian kedalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu : (1) sangat berhasil (capaian > 100%), (2) berhasil (capaian 80-100), (3) cukup berhasil (capaian 60-80%) dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja yang diukur dibedakan atas 2 (dua) jenis indicator, yaitu *lead indicator* dan *lag indicator*. *Lead Indicator* adalah indikator yang pencapaiannya dibawah kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator proses atau indikator aktivitas. Sedangkan *lag indicator* adalah indicator yang pencapaiannya diluar kendali organisasi. Indikator ini juga dikenal dengan istilah indikator *output* atau indikator *outcome*. Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) eselon II menggunakan jenis indicator *output*. Sehingga Perjanjian Kinerja (PK) eselon II menggunakan *Lag Indicator* .

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja kegiatan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meningggalkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas.

Capaian kinerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang tahun 2021 diuraikan masing-masing tiap sasaran strategis dan indikator kinerja, meliputi : capaian kinerja tahun 2021, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. Berikut disampaikan uraian capaian kinerja.

1. Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2021

Unit Eselon I : Badan PPSDMP
Tahun Anggaran 2021

(A) Meningkatnya kualitas sumderdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional

Indikator : Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya

a. Jumlah pelatihan vokasi pertanian bagi apartur

Target kinerja BBPP Binuang tahun 2021 untuk indikator kinerja jumlah aparatur pertanian yang terlatih adalah 30 orang dengan rincian target. Untuk Triwulan II tahun 2021 realisasi capaian indikator kinerja jumlah aparatur tahun Triwulan II tahun 2021 sebesar 30 orang (100%). Perbandingan realisasi kinerja BBPP Binuang Triwulan II tahun 2021 untuk indikator jumlah aparatur pertanian yang terlatih :

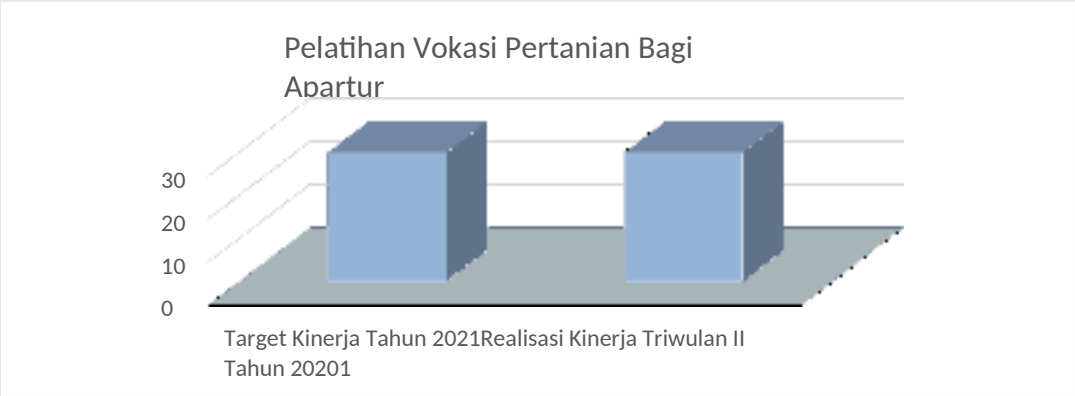

Gambar 5. Persentase Indikator Jumlah Aparatur Pertanian Yang Terlatih

Gambar diatas menunjukkan Realisasi yang telah tercapai dan target kinerja BBPP Binuang 2021. Persentase jumlah aparatur pelatihan yang telah dilatih sebesar **0%** dikarenakan masih dalam tahap perencaan.

b. Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur

Target kinerja BBPP Binuang tahun 2021 untuk indikator kinerja jumlah non aparatur pertanian yang terlatih adalah 490 orang dengan. Terdiri dari Pelatihan bagi Non Aparatur, dan Pelatihan Tematik Berbasis Korporasi mendukung Food Estate. Untuk tahun 2021 realisasi capaian indikator kinerja jumlah non aparatur tahun Triwulan II tahun 2021 sebesar 477 orang dari atau sebesar (97,34%). Perbandingan realisasi kinerja BBPP Binuang Triwulan II tahun 2021 untuk indikator jumlah non aparatur pertanian yang terlatih :

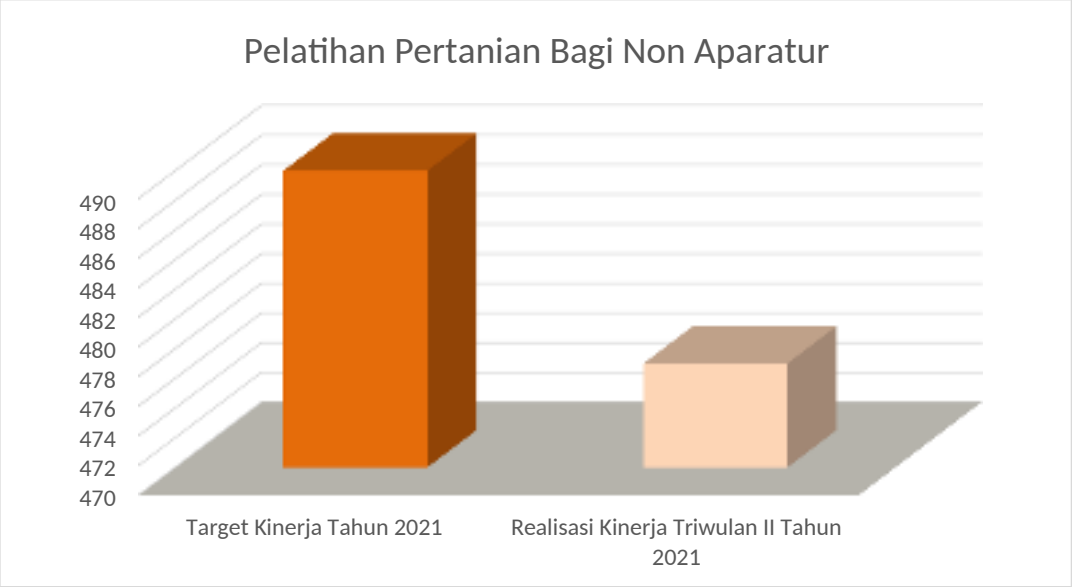

Gambar 6. Persentase Indikator Jumlah Non Aparatur Pertanian Yang Terlatih

Gambar 6 menunjukkan Realisasi yang telah tercapai dan target kinerja BBPP Binuang tahun 2021. Persentase jumlah non aparatur pelatihan yang telah dilatih sebesar 97,34 % dari target yang telah direncanakan.

c. Jumlah Aparatur Dan Non Aparatur Pertanian Yang Disertifikasi

Realisasi capaian indikator kinerja jumlah Aparatur dan non aparatur pertanian yang tersertifikasi tahun 2021 belum dilaksanakan di Triwulan II. Meski demikian Sertifikasi yang dilakukan Setifikasi Operator Asintan Pra Panen Non Aparatur Pertanian, dengan anggaran dari Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) BPPSDMP sedang dilakukan oleh BBPP Binuang, dengan jumlah peserta 31 orang.

d. Bimbingan Teknis (Bimtek)

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang mendampingi pelaksanaan Bimtek terutama mendukung program Food Estate, dan pelatihan lainnya. Bimtek tersebut meliputi Pertanian Terpadu, Integrasi Tanaman, dan Kelompok Usaha Bersama, dll. Realisasi yang telah dicapai mencapai 1.200 orang atau 100% dari capain target.

e. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Pertanian

Realisasi capaian indikator peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian tahun sampai dengan Triwulan II tahun 2021 telah menumbuh kembangkan P4S sebanyak 152, terdiri dari tingkatan P4S utama, madya dan pemula masing masing 5, 35, dan 112 lembaga, yang tersebar pada 5 (lima) Provinsi se-Kalimantan (Kalimantan selatan, Kalimantan barat, Kalimantan utara, Kalimantan tengah dan Kalimantan timur).

f. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Penyerapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor pertanian tahun sudah mencapai 780 orang dari target 1.170 orang atau 66,67 persen. Terdiri dari Pelatihan bagi Aparatur (PEN), Pelatihan Manajerial BPP Kostratani (PEN), Pelatihan Teknis bagi Non Aparatur (PEN). Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dikucurkan karena merupakan kontributor utama pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), karena selalu tumbuh positif dan menjadi bantalan ekonomi selama pandemi Covid 19.

Secara keseluruhan realisasi kinerja BBPP Binuang dibandingkan dengan target sebagai berikut :

Tabel 4. Realisasi Kinerja BBPP Binuang Dibandingkan Dengan Target Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target Tahunan		Realisasi	Persen
	2021	Satuan	Triwulan II 2021	
Pelatihan bagi Aparatur	30	orang	30	100%
Pelatihan bagi Non Aparatur	280	orang	262	93,57%
Pelatihan Tematik Berbasis Korporasi mendukung Food Estate	210	orang	215	102,38%
BIMTEK bagi Petani dan Penyuluh	1.200	orang	1.200	100%
Pelatihan bagi Aparatur (PEN)	360	orang	120	33,33%

Indikator Kinerja	Target Tahunan		Realisasi	Persen
	2021	Satuan	Triwulan II 2021	
Pelatihan Manajerial BPP Kostratani (PEN)	120	orang	120	100%
Pelatihan Teknis bagi Non Aparatur (PEN)	690	orang	540	78,26%
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	30	orang	-	0%
Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Penumbuhan dan Penguatan P4 S)	7	lembaga	5	71,42%

g. Perbandingan Realisasi Kinerja BBPP Binuang Triwulan II Tahun 2021 Dengan Target Tahun 2021

Program Tahun 2021 adalah peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian dengan kegiatan utama yang mendukung program tersebut adalah Pemantapan sistem pelatihan pertanian yang terdiri Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian, Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian, serta Penumbuhan dan Penguatan P4S.

Tabel 5. Target dan realisai Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian

Pelatihan Vokasi Bidang Pertanian dan Pelatihan mendukung Program Prioritas Pembangunan Pertanian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	30	-	22,75%
Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur	30	30	100%
Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur	490	477	97,34%

Sedangkan Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian dan Penumbuhan dan Penguatan P4S belum dilakukan di Triwulan II tahun 2021.

(B) Reformasi Reformasi Birokrasi BBPP Binuang Yang Efektif, Efisien, Dan Berorientasi Layanan Pada Prima

Indikator : Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Reformasi Birokrasi merupakan tulang punggung dan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara dimana Reformasi Birokrasi diperlukan untuk membangun pondasi yang diperlukan. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek

Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, maka perlu dilakukan penlian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap Kementerian/Lembaga.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019, dimana seluruh Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPP Binuang dilakukan secara tahunan, sehingga untuk Triwulan II tahun 2021 belum dihitung realisasi capainnya.

(C) Terkelolanya Anggaran BBPP Binuang Yang Akuntabel Dan Berkualitas

a. Realisasi Anggaran

Berdasarkan alokasi anggaran Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Tahun 2021, pagu anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja adalah Rp. 16.896.112.000,-. Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan tanggal Triwulan II tahun 2021 adalah sebesar Rp 3.447.227.909 atau 20,40%.

Tabel 6. Realisasi Anggaran BBPP Binuang Triwulan II Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	1810.AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev, dan Pelaporan	2.100.000.000	1.532.915.344	73.00%
2	1810.AEA.002	196.000.000	50.971.400	26.01%

	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (PEN)			
3	1810.BDB.001 Penumbuhan dan Penguatan P4S	266.000.000	59.620.000	22.41%
4	1810.CAG.001 Sarana Pelatihan Pertanian	89.677.000	-	0.00%
5	1810.PDI.001 Sertifikasi Profesi dan SDM	78.000.000	-	0.00%
6	1810.SSC Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	6.798.673.000	2.660.697.446	39.14%
7	1813.EAA.002 Layanan Perkantoran UPT Pelatihan	7.367.762.000	3.251.263.804	44.13%
	Jumlah	16.896.112.000	7.660.404.678	45.34%

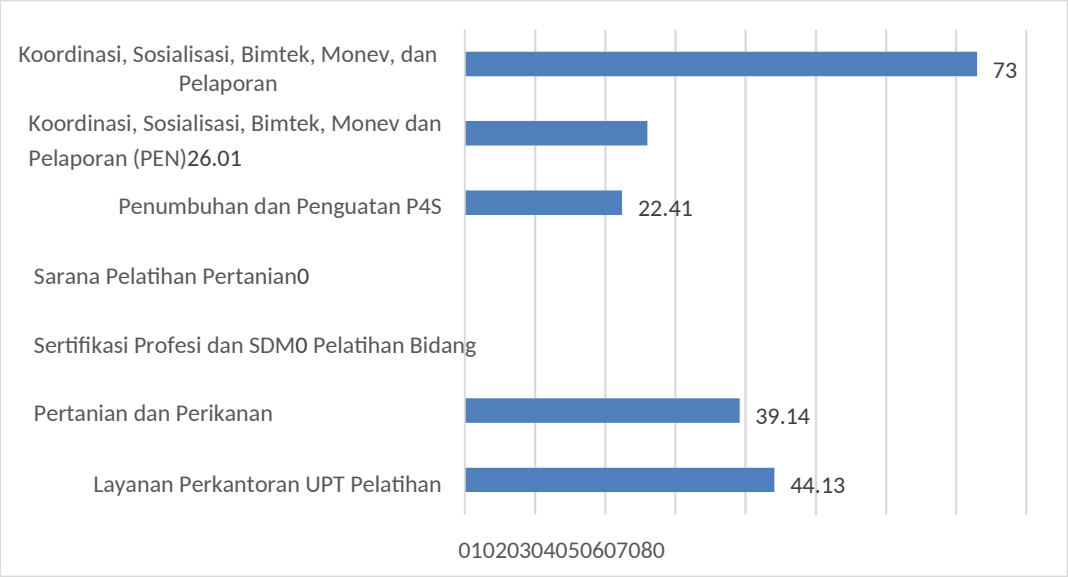

Gambar 7. Realisasi Anggaran BBPP Binuang Tahun 2021 (dalam persentase)

Program Penumbuhan dan Penguatan P4S dan Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian belum dilaksanakan.

b. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

a. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Penggunaan sumberdaya yang dapat dihitung tingkat efisiennya adalah penggunaannya sumber daya anggaran. Selain jumlah sumberdaya manusia yang berada dalam unit kerja, sumberdaya anggaran merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi kerja.

Capaian realisasi anggaran BBPP Binuang pada tahun 2021 sebesar Rp. 16.896.112.000,- dan Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp. 7.660.404.678,- (45,34%), jika dikaitkan dengan analisis efisiensi sumberdaya anggaran, yang mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 tahun 2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga (PMK 249/2011), capaian kinerja pelaksanaan anggaran BPP Binuang Triwulan II tahun 2021 pada gambar berikut :

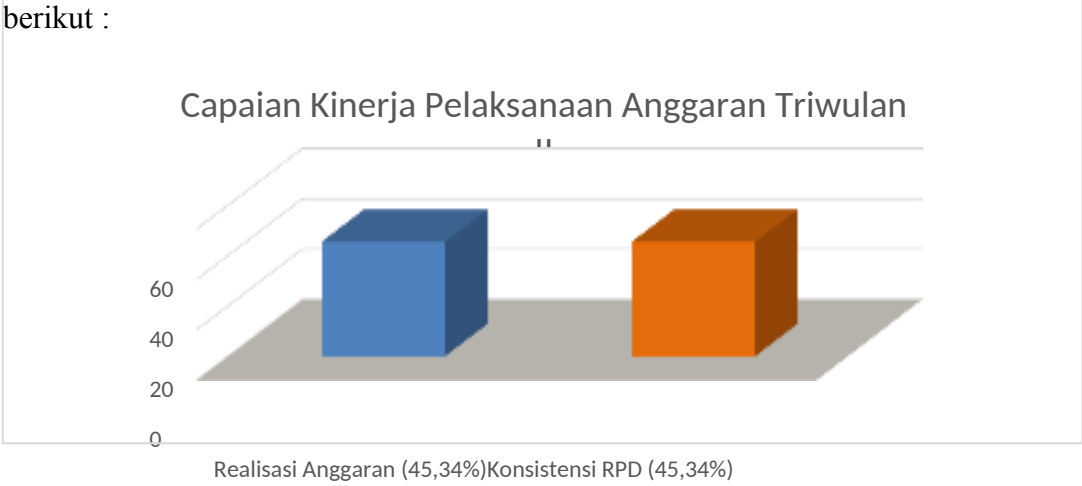

Gambar 8. Analisis Efisiensi Sumberdaya Anggaran BBPP Binuang

Berdasarkan Gambar 8 pencapaian nilai kinerja BBPP Binuang Triwulan II tahun 2021 termasuk kedalam kategori BAIK. Persentase capaian kinerja BBPP Binuang tahun 2021 berdasarkan aplikasi monev kinerja anggaran PMK 249/2011 diatas, secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase pencapaian kinerja dalam hal penyerapan anggaran adalah 45,34%.
2. Persentase pencapaian kinerja dalam hal konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD adalah Rp 16.896.112.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II tahun 2021 sebesar Rp 7.660.404.678,- sebesar 45,34%.

C. Kinerja Lainnya

Berdasarkan 4 (empat) kegiatan indikator kinerja, yakni (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Binuang, (2) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Binuang yang terjadi berulang, (3) Jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang 5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015, Maka pencapaian masing-masing kegiatan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Binuang = 3,69 (skala likert) dari target 3,91, persentase 94,37 % (kategori berhasil).
2) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Binuang yang terjadi berulang = belum ada pemeriksaan BPK.
3) Jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP yang terjadi berulang 5 aspek SAKIP sesuai Permenpan RB 12 tahun 2015 = belum ada pemeriksaan itjen.

Hasil pengukuran kinerja BBPP Binuang Triwulan II tahun 2021 dari target realisasi capaian kinerja pada masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Binuang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Untuk mengetahui sejuh mana pelayanan publik mampu memenuhi harapan masyarakat di suatu daerah maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan jaman dan harapan masyarakat

pada saat ini. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei Indeks Kepuasan Mayarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamantkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PermenPan) Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014 dan pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Menteri Pendayaunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan sebagai responden secara langsung, pertanyaan kuesioner meliputi 9 unsur yang mengacu pada Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2019 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian, yaitu :

1. Persyaratan pelayanan, yaitu ketentuan untuk mendapatkan suatu jenis pelayanan publik yang meliputi persyaratan administrasi dan teknis.
2. Sistem, mekanisme dan Prosedur Pelayanan , yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi pelayanan publik dan penerima pelayanan publik termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian Pelayanan, yaitu Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan publik.
4. Biaya/tarif pelayanan, yaitu biaya atau tarif yang dikenakan.
5. Kesesuaian Produk Pelayanan, yaitu kesesuaian Produk yang dikeluarkan dengan aturan yang telah ditetapkan.
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian petugas dalam melayani ataupun menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Perilaku Petugas dalam Pelayanan Terkait Kesopanan, yaitu sikap dan perilaku petugas secara ramah dan sopan serta menghormati dan menghargai masyarakat.
8. Kualitas Sarana dan Prasarana, Yaitu kondisi sarana dan prasarana yang baik dan layak digunakan.

9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil survei SKM dan Nilai Rata - Rata (NRR) pada Triwulan II tahun 2021 yang diperoleh dari 9 Indikator Unsur pelayanan, diperoleh nilai rata-rata :

1. Persyaratan Pelayanan	:	3,68
2. Prosedur Pelayanan	:	3,67
3. Waktu Penyesuaian Pelayanan	:	3,58
4. Biaya/ Tarif Pelayanan	:	3,92
5. Kesesuaian Produk Pelayanan	:	3,59
6. Kemampuan Petugas Pelayanan	:	3,60
7. Kecepatan pelayanan	:	3,60
8. Kualitas Sarana dan Prasarana	:	3,94
9. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	:	3,63

Melihat hasil tabulasi dari 9 Unsur Pelayanan tersebut diperoleh Nilai Rata rata Tertimbang per unsur adalah : 3,69 (kategori mutu pelayanan sangat baik) Dan Nilai SKM Unit Pelayanan : 92,25 (A = Sangat Baik).

Dari hasil tabulasi tersebut dapat dilihat bahwa dengan nilai SKM 92,25 atau 3,69 disimpulkan bahwa kategorisasi mutu pelayanan A dan kinerja unit pelayanan adalah *Sangat Baik*. Jika dilihat dari Nilai Rata Rata (NRR) unsur *Kualitas Sarana dan Prasarana dan Biaya/ Tarif Pelayanan* (3,94) nilai tertinggi, sedangkan unsur dengan nilai terendah adalah unsur *Waktu Penyesuaian Pelayanan* (3,58). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari Kualitas Sarana dan Prasarana dan Biaya/Tarif Pelayanan, sedangkan Kesesuaian Produk Pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Secara keseluruahn nilai SKM 3,69 termasuk kategori pelayanan sangat baik.

b. Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BBPP Binuang, dengan Indikator Jumlah Temuan Itjen atas Implementasi SAKIP Yang Terjadi Berulang (5 Aspek SAKIP sesuai Permentan RB 12 Tahun 2015)

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD.

Lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan kinerja
2. Penilaian terhadap pengukuran kinerja
3. Penilaian terhadap pelaporan kinerja
4. Penilaian terhadap evaluasi internal
5. Penilaian terhadap capaian kinerja

Sampai Triwulan II Tahun 2021, belum dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di BBPP Binuang

c. Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BBPP Binuang, dengan Indikator Jumlah Temuan BPK atas Temuan Itjen Atas Pengelolaan Keuangan BBPP Binuang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga Negara yang dikhususkan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. LHP ini berfungsi untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan, mencegah gejala korupsi dan sebagai alat bukti yang cukup kuat dalam penanganan

tindak pidana korupsi. Di tahun 2021 BPK belum melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan di BBPP Binuang untuk Triwulan II Tahun 2021.

d. Penerimaan PNBP

BBPP Binuang selain menggunakan dana Rupiah Murni (RM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPP juga menggunakan dana PNPB. Kegiatan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak yang di pungut melalui bendahara penerima. PNBP Meliputi Penerimaan Umum dan Fungsional dimana pada tahun 2021, Penerimaan Umum Meliputi: Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah;penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL ; penerimaan kembali belanja lainnya TAYL ; pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara.

Pendapatan Fungsional meliputi: Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya, Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi, Perkiraan Penerimaan PNBP untuk Penerimaan Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan. Target penerimaan PNBP sebesar Rp. 104.276.000,- dan telah diperoleh sebesar Rp. 22.548.500,- Capaian kinerja penerimaan PNBP (21,63%) Triwulan II Tahun 2021 sebagaimana gambar berikut :

Tabel 7. Realisasi PNBP Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Per Juni 2021

No	Jenis Penerimaan	Jumlah (Rupiah)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Penerimaan Fungsional					
1.	Pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan budidaya	9.214.500	8.234.000		
2.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	2.000.000	3.100.000		
3	Perkiraan Penerimaan PNBP untuk	-			

No	Jenis Penerimaan	Jumlah (Rupiah)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Penerimaan Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan				
Jumlah		11.214.500	11.334.000		
Jumlah Total		22.548.500			

Realisasi penerimaan PNBP sampai dengan bulan Triwulan II Tahun 2021 sebesar 21,63% atau senilai Rp. 22.548.500,-

D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Secara umum pelaksanaan kegiatan Triwulan II Tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik namun masih mengalami hambatan/kendala yaitu :

a. Kami berharap kesuksesan dalam mensupport arahan Menteri Pertanian dalam hal ini BPPSDMP Kementan dalam rumusan tiga program aksi meliputi penguatan Kostratani, membangun 2,5 juta petani milenial dan mendukung program Kementerian Pertanian lainnya terutama Food Estate. Selain itu partisipasi aktiif dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna mensupport pertumbuhan positif sektor pertanian dan menjadi bantalan ekonomi selama pandemi Covid 19. Dalam dukungan kuat tersebut BBPP Binuang mempunyai mandat bersifat regional dan nasional, yang memiliki kekhasan bidang pertanian.
b. Pandemi corona masih mempengaruhi kinerja dalam meningkatkan kapasitas SDM pertanian, terutama menurunkan intensitas pertemuan dan pelatihan. Meskipun demikian tidak menyurutkan antusias peserta pelatihan dengan melakukan protokol kesehatan dengan disiplin ketat, meliputi menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak pada saat pertemuan berlangsung.
c. Guna menggalang dukungan Instansi terkait yang berada di Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelatihan berbasis program dan wilayah, dimana pesertanya dominan berasal dari wilayah Kabupaten/Kota setempat, maka optimalisasi fungsi koordinasi dan sosialisasi menjadi sangat penting perannya sebagai upaya untuk penyamaan persepsi terhadap penyiapan SDM dalam melaksanakan program pembangunan khsusnya pertanian wilayah, dan diharapkan akan mendorong dukungan yang berujung partisipasi aktif semua jajaran di pemerintah daerah

Kabupaten/Kota. Demikian pula terhadap kemungkinan adaya share biaya dalam peningkatan SDM di daerah, dapat juga menjadi bahan pertimbangan sebagai bentuk sense daerah untuk peduli terhadap peningkatan kapasitas SDM di sektor pertanian, sehingga pada gilirannya pelaksanaan program pembangunan pertanian khususnya diwilayah Kabupaten/Kota akan menjadi gerakan bersama antara masyarakat, pemerintah dan swasta, dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan khususnya disektor pertanian.

d. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum memenuhi target Tahun 2021, dengan nilai atas layanan publik BBPP Binuang = 3,69 (skala likert) dari target 3,91, persentase 94,37 %. Oleh karena itu di triwulan berikutnya diperlukan peningkatan terhadap pelayanan khususnya pada bagain Waktu Penyesuaian Pelayanan, Kesesuaian Produk Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, dan Kecepatan pelayanan.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja BBPP Binuang ini telah tersusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian kinerja balai untuk kurun waktu Triwulan II Tahun 2021. Hasil pengukuran kinerja BBPP Binuang Triwulan II Tahun 2021 dalam pencapaian meningkatkan kualitas sumderdaya manusia dan kelembagaan pertanian nasional, dengan indikator kinerja jumlah aparatur terlatih Triwulan II Tahun 2021 sudah mencapai 100%. Sedangkan realisasi capaian indikator kinerja jumlah non aparatur terlatih sebesar sebesar 97,34%. Realisasi capaian indikator peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan pertanian triwulan II Tahun 2021 telah menumbuh kembangkan P4S sebanyak 152 lembaga. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksana Reformasi Birokrasi (PMPRB) BBPP Binuang dilakukan secara tahunan, sehingga untuk Triwulan II Tahun 2021 belum dihitung realisasi pencapainnya.

Hasil pengukuran kinerja BBPP Binuang berdasarkan alokasi anggaran tahun 2021, pagu anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja adalah Rp. 16.896.112.000,- Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 adalah sebesar Rp7.660.404.678,- atau 45,34%.

Hasil pengukuran kinerja BBPP Binuang Triwulan II Tahun 2021 untuk pencapaian kinerja lainnya adalah : (1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik BBPP Binuang = 3,69 (kategori mutu pelayanan sangat baik) Dan Nilai SKM Unit Pelayanan : 92,25 (A = Sangat Baik) dari target 4, persentase 93,77 % (kategori sangat baik); (2) Jumlah temuan BPK atas pengelolaan keuangan BBPP Binuang yang terjadi berulang = belum dilakukan pemeriksaan di Triwulan II Tahun 2021; (3) Jumlah temuan itjen atas implementasi SAKIP = belum dilakukan pemeriksaan di Triwulan II Tahun 2021; (4) Realisasi penerimaan PNBP sampai dengan bulan Triwulan II Tahun 2021 sebesar 10,75%.

Demikian Laporan ini disusun sebagai instrumen monitoring kinerja balai sebagai unit kerja BPPSDMP. Kami berharap laporan kinerja tersebut dapat dipergunakan dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode mendatang.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BBPP Binuang Triwulan II 2021

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

BULAN JUNE 2021

NILAI IKM

92

NAMA UNIT : BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN (BBPP) BINUANG

RESPONDEN

JUMLAH	:	118	Orang					
JENIS KELAMIN	:	L	:	91	Orang	P :	27	Orang
PENDIDIKAN	:	SD	:	11	Orang			
		SLTP	:	7	Orang			
		SLTA	:	51	Orang			
		DI/DII/DII	:	4	Orang			
		S1	:	45	Orang			
		S2 Keata	:	-	Orang			

Periode Survey: 01 Jan 2021 s/d 30 Jun 2021

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

NILAI IKM UNIT PELAYANAN

A (Sangat Baik) : 88.31 - 100.00 ***B (Baik) : 76.61 - 88.30*** ***C (Kurang Baik) : 65 - 76.60*** ***D (Tidak Baik) : 25 - 64.99***

Nilai Per Unsur Pelayanan

Keterangan :

U1 : Persyaratan
U2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
U3 : Waktu Penyelesaian
U4 : Biaya/Tarif
U5 : Produk Spesifikasi jenis pelayanan U6 : Kompetensi pelaksana
U7 : Perilaku pelaksana
U8 : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan U9 : Sarana dan Prasarana

Pengolahan Data Kuisioner

Perhitungan	Nilai Per Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Jumlah Nilai Per Unsur	434	433	422	463	424	425	425	465	428
Nilai Rata Rata Per Unsur	3.68	3.67	3.58	3.92	3.59	3.60	3.60	3.94	3.63
Nilai Rata Rata Tertimbang Per Unsur (NRR per unsur x 0.1111)	0.41	0.41	0.40	0.44	0.40	0.40	0.40	0.44	0.40
IKM Unit Pelayanan (Total NRT * 25)	92.25								
Mutu Pelayanan	**3.69**	**A**	**Sangat Baik**						

Keterangan :

U1 : Persyaratan
U2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
U3 : Waktu Penyelesaian
U4 : Biaya/Tarif
U5 : Produk Spesifikasi jenis pelayanan U6 : Kompetensi pelaksana
U7 : Perilaku pelaksana
U8 : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan U9 : Sarana dan Prasarana